

ABSTRAK

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI LAMPUNG TAHUN 2022

Oleh

DEADORA KUFIANA FIRDAUS

Di Indonesia, dalam hal dunia kerja banyak sekali kejanggalaan yang ditemukan. Pekerja/buruh banyak yang melakukan demonstrasi karena hak asasinya tidak terpenuhi. Begitu juga dengan imbalan/upah yang diterima para pekerja/buruh sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi di Lampung tahun 2022 meliputi aspek menetapkan standar, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerapan Upah Minimum Provinsi Lampung yang pertama, berdasarkan indikator penetapan standar sudah sesuai dengan SOP yang menjadi acuan dalam penetapan standar pengawasan. Kedua, dalam mengadakan penilaian pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan perusahaan yang dituju juga sudah menerapkan UMP sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan sarana seperti transportasi yang dimiliki juga masih terbatas. Ketiga, pada tindakan perbaikan masih belum terealisasi karena diperlukannya peningkatan jumlah pegawai pengawas fungsional ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung agar lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan dan perlunya peningkatan jumlah sarana seperti transportasi.

Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE MANPOWER SERVICE ON IMPLEMENTATION PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN LAMPUNG IN 2022

By

DEADORA KUFIANA FIRDAUS

In Indonesia, in terms of the world of work, many irregularities have been found. Many workers/laborers hold demonstrations because their human rights are not fulfilled. Likewise, the compensation/wages received by workers/laborers are often not in accordance with what is expected. The formulation of the problem in this research is how is the supervision of the Department of Manpower regarding the application of the Provincial Minimum Wage in Lampung in 2022 including aspects of setting standards, conducting assessments, and carrying out corrective actions. The research method used in this study uses a descriptive qualitative research type.

The results and discussion of the research show that the supervision of the implementation of the first Lampung Provincial Minimum Wage, based on indicators of standard setting, is in accordance with the SOP which is the reference in setting supervision standards. Second, in carrying out supervisory assessments it is in accordance with the provisions that have been set and the intended company has also implemented the UMP in accordance with government regulations. However, there are several limitations in the number of labor inspectors at the Lampung Provincial Manpower Office and facilities such as transportation are still limited. Third, the corrective action has not been realized because it is necessary to increase the number of functional supervisors for the employment function of the Lampung Province Manpower Office so that it is even more optimal in carrying out supervision and the need to increase the number of facilities such as transportation.

*Key words: Supervision, Provincial Minimum Wage, Lampung Province
Manpower Office*